



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 04 Maret 2017

Halaman: 9

TARGETKAN 50 BIDANG TERSERTIFIKAT

Pemkot Mulai Data Sultan Ground

YOGYA (KR) - Tahun ini Pemkot Yogya turut terlibat dalam pendataan Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG). Selain pendataan, bidang tanah SG maupun PAG kelak akan disertifikatkan sekaligus.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya Hary Setyawana mengungkapkan, pendataan SG dan PAG tersebut hanya menindaklanjuti data yang disodorkan dari Pemda DIY. "Kami mendapat alokasi sebesar Rp 200 juta dari Dana Keistimewaan (Danais) untuk proses pendataan sultan ground. Baru tahun ini,

sehingga targetnya hanya 50 bidang," terangnya, Jumat (3/3).

Terkait agenda pendataan tersebut, masyarakat yang menempati SG maupun PAG juga tidak perlu khawatir. Kelak usai dilakukan pendataan justru aspek legalitasnya akan semakin jelas. Pasalnya, Pemkot akan memfasilitasi bidang tanah

yang berstatus SG maupun PAG untuk proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogya.

Hanya, imbuh Hary, belum semua bidang tanah milik Kraton dan Pakualaman yang ada di Kota Yogya dapat dituntaskan tahun ini, melainkan secara bertahap.

"Ini baru pertama dengan target lima puluh bidang dulu. Sebenarnya di luar itu masih cukup banyak. Tapi data yang sudah kami pegang baru ada sekitar enam puluh bidang. Sekarang sedang kami klasifikasi dulu untuk menentukan priori-

tas," imbuhnya.

Oleh karena itu, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya hingga kini juga belum mengantongi data seluruh bidang tanah SG dan PAG. Namun, data dari Pemda DIY hasil pendataan 2015 lalu, tercatat ada 58.219.146 meter persegi, baik SG maupun PAG yang terbagi dalam 13.226 bidang. Total lahan tersebut juga tersebar di wilayah DIY. Ditargetkan, seluruh SG dan PAG itu dapat disertifikasi pada 2024 mendatang.

Hary menambahkan, bidang SG dan PAG yang di-

prioritaskan dalam sertifikasi saat ini ialah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Terutama area pemakaman yang dikelola wilayah maupun lahan yang di atasnya terbangun area publik.

"Setelah didata, kami ajukan ke BPN. Kemudian ketika sertifikat terbit, kami berikan ke Kraton atau Pakualaman. Tapi kami juga akan memintakan surat kekancingan dan kami berikan ke pengelola atau pemanfaat supaya aspek legalitasnya terjaga," paparnya.

(Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005